

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PIUTANG TAK
TERTAGIH, DAN PERPUTARAN ARUS KAS
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN CONSUMER GOODS
YANG TERDAFTAR DI BEI**

SKRIPSI

**GIBSON RADITYO LIM
NIM : 18622204**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PIUTANG TAK
TERTAGIH, DAN PERPUTARAN ARUS KAS
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN CONSUMER GOODS
YANG TERDAFTAR DI BEI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

Nama : GIBSON RADITYO LIM

NIM : 18622204

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PIUTANG TAK TERTAGIH,
DAN PERPUTARAN ARUS KAS TERHADAP MANAJEMEN
LABA PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Diajukan kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

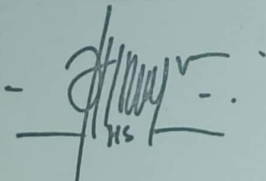
Oleh:

NAMA : GIBSON RADITYO LIM
NIM : 18622204

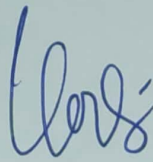
Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor



Afriyadi, S.T., M.E.
NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

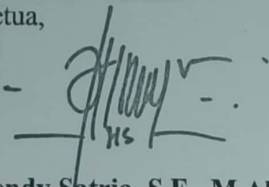
**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PIUTANG TAK TERTAGIH,
DAN PERPUTARAN ARUS KAS TERHADAP MANAJEMEN
LABA PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : GIBSON RADITYO LIM
NIM : 18622204

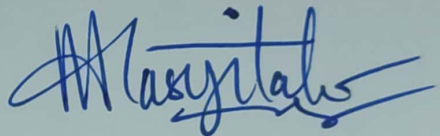
Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Enam Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



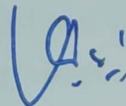
Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor

Sekretaris,



Masyitah As Sahara, S.E., M.Si.
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Anggota,



Vanisa Meifari, S.E., M.Ak.
NIDN. 1026059301 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 16 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Gibson Radityo Lim
NIM : 18622204
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.56
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Pajak, Piutang Tak Tertagih,
dan Perputaran Arus Kas terhadap Manajemen Laba
Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di
BEI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 16 Agustus 2022

Penyusun,



GIBSON RADITYO LIM

NIM : 18622204

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa ata segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Tuhan, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat kukasihi dan sayangi

Papa dan Mama tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hinggga, saya persembahkan karya kecil ini untuk papa dan mama yang telah memberikan kasih dan sayng, dukungan serta cinta kasih yang telah diberikan yang tak terhingga dan tidak mungkin terbalas dengan selemba kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat papa dan mama bahagia

Sahabat-sahabat Pejuang Skripsi

Untuk sahabat-sahabatku sekalian, tiada yang paling menyenangkan saat kumpul akur bersama, walaupun kadang-kadang kita bertengkar, tapi hal itu selalu memberikan warna yang tidak akan saya lupakan. Terimakasih atas dukungannya

HALAMAN MOTTO

“Sometimes it is better to lose and do the right thing than to win and do the wrong thing”

- Tony Blair

“The only thing that will make you happy is being happy with who you are not who people think you are”

- Goldie Hawn

“When someone tell you that you can't do something, perhaps you should consider that they are only telling you what they can't do”

- Sheldon Cahoon

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PIUTANG TAK TERTAGIH, DAN PERPUTARAN ARUS KAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BEI”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO selaku Ketua Program Studi S1 dan dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, saran, dan

perbaikan terhadap penyusunan skripsi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Afriyadi, ST., ME dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tak pernah lelah dalam memberikan arahan serta bimbingan.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf secretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Seluruh anggota keluargaku yang terus memberikan dukungan mereka kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi yang tak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 16 Agustus 2022

Penulis

GIBSON RADITYO LIM

NIM 18622204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	8
1.5.2 Kegunaan Praktis	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Stakeholder Theory</i>	10
2.1.2 Manajemen Laba	12
2.1.3 Definisi Pajak	19
2.1.4 Definisi Hukum Pajak	21

2.1.5 Fungsi Pajak	23
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	24
2.1.7 Pajak Penghasilan	26
2.1.8 Perencanaan Pajak	29
2.1.9 Teori dan Praktik Akuntansi	30
2.1.10 Standar Akuntansi di Indonesia	31
2.1.11 Konsep Aktiva	34
2.1.12 Pengungkapan Informasi Kualitatif	35
2.1.13 Piutang	38
2.1.14 Laporan Arus Kas	39
2.2 Hubungan Antar Variabel	40
2.2.1 Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	40
2.2.2 Hubungan Piutang Tidak Tertagih Terhadap Manajemen Laba	41
2.2.3 Hubungan Perputaran Arus Kas Terhadap Manajemen Laba	41
2.2.4 Hubungan Perencanaan Pajak, Piutang Tidak Tertagih dan Perputaran arus kas terhadap manajemen laba.....	42
2.3 Kerangka Pemikiran	42
2.4 Hipotesis Penelitian	43
2.5 Penelitian Terdahulu	43
2.5.1 Aditama dan Purwaningsih (2014)	43
2.5.2 Taufiqur Rachman (2015)	44
2.5.3 Ningsih and Jogi (2018)	44
2.5.4 Lee and Choi (2016)	44
2.5.5 Ftouhi and Ghardallou (2020)	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Data	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4 Populasi dan Sampel	46
3.4.1 Populasi	46
3.4.2 Sampel	49

3.5 Definisi Operasional Variabel	51
3.5.1 Variabel Independen	51
3.5.2 Variabel Dependen	52
3.6 Teknik Pengolahan Data	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
3.7.1 Analisis Regresi Data Panel	54
3.7.1.1 Estimasi Regresi Data Panel	56
3.7.1.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	58
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	60
3.7.2.1 Uji Normalitas	60
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas	61
3.7.2.3 Uji Heteroskedastitas	62
3.7.3 Uji Hipotesis	63
3.7.3.1 Uji T (Uji Parsial)	63
3.7.3.2 Uji F (Uji Simultan)	64
3.7.4 Regresi Linear Berganda	64
3.7.5 Koefisien Determinasi (R^2)	65
3.8 Jadwal Penelitian	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	67
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	67
4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan	67
4.2 Data Penelitian	69
4.2.1 Perencanaan Pajak	69
4.2.2 Piutang Tak Tertagih	71
4.2.3 Perputaran Arus Kas	74
4.2.4 Manajemen Laba	77
4.3 Analisis Hasil Penelitian	79
4.3.1 Statistik Deskriptif	79

4.3.2 Uji Estimasi Model Regresi	81
4.3.2.1 Uji <i>Common Effect Model (CEM)</i>	81
4.3.2.2 Uji <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	81
4.3.2.3 Uji <i>Random Effect Model (REM)</i>	82
4.3.3 Uji Pemilihan Model Terbaik	83
4.3.3.1 Uji Chow	83
4.3.3.2 Uji Lagrange Multiplier	84
4.3.4 Uji Asumsi Klasik	86
4.3.4.1 Uji Normalitas	86
4.3.4.2 Uji Multikolinearitas	86
4.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas	87
4.3.5 Analisis Regresi Linear Berganda	88
4.3.6 Uji Hipotesis	89
4.3.6.1 Uji T (Parsial)	89
4.3.6.2 Uji F (Simultan)	91
4.3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	93
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	93
4.4.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	93
4.4.2 Pengaruh Piutang Tak Tertagih Terhadap Manajemen Laba ...	94
4.4.3 Pengaruh Perputaran Arus Kas Terhadap Manajemen Laba ...	94
4.4.4 Pengaruh Perencanaan Pajak, Piutang Tak Tertagih, dan Perputaran Arus Kas Terhadap Manajemen Laba	95

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Manajemen Laba	6
2.	Populasi	46
3.	Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria	50
4.	Sampel Perusahaan <i>Consumer Goods</i>	50
5.	Jadwal Penelitian	66
6.	Data Perencanaan Pajak	69
7.	Data Piutang Tak Tertagih	72
8.	Data Perputaran Arus Kas	74
9.	Data Manajemen Laba	77

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	42
2.	Grafik Perencanaan Pajak	71
3.	Grafik Piutang Tak Tertagih	73
4.	Grafik Perputaran Arus Kas	76
5.	Grafik Manajemen Laba	79
6.	Statistik Deskriptif	80
7.	<i>Common Effect Model</i>	81
8.	<i>Fixed Effect Model</i>	82
9.	<i>Random Effect Model</i>	83
10.	Uji Chow	84
11.	Uji Lagrange Multiplier	85
12.	Uji Normalitas	86
13.	Uji Multikolinearitas	87
14.	Uji Heteroskedastisitas	87
15.	Analisis Regresi Linear Berganda	88
16.	Hasil Uji T	90
17.	Hasil Uji F	92
18.	Hasil Uji Koefisien Determinasi	93

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1:	Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021
Lampiran 2:	Data Perencanaan Pajak, Piutang Tak Tertagih, Perputaran Arus Kas dan Manajemen Laba
Lampiran 3:	Hasil Pengujian EViews 12
Lampiran 4:	Persentase Plagiarisme

ABSTRAK

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PIUTANG TAK TERTAGIH, DAN PERPUTARAN ARUS KAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BEI

Gibson Radityo Lim. 18622204. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
gibsonlim55@gmail.com

Perusahaan yang didirikan pasti memiliki suatu tujuan, salah satunya yaitu untuk memperoleh laba. Meskipun ada juga perusahaan yang didirikan dengan tujuan nirlaba, akan tetapi kebanyakan perusahaan yang ada disekitar kita pasti didirikan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan harus memiliki tenaga kerja atau tenaga ahli yang dapat memproyeksikan dan menyusun rencana untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, piutang tak tertagih, dan perputaran arus kas terhadap manajemen laba pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 14 perusahaan consumer goods dengan periode pengamatan dari tahun 2018-2021. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder. Alat yang digunakan untuk melakukan uji analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan EViews 12.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, piutang tak tertagih berpengaruh secara parsial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, perputaran arus kas secara parsial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak, piutang tak tertagih dan perputaran arus kas secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Adapun saran untuk perusahaan yang dapat peneliti berikan ialah agar perusahaan dapat lebih memperhatikan manajemen laba agar dalam menerapkan dapat membawa perusahaan kearah yang lebih baik.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Piutang Tak Tertagih, Perputaran Arus Kas, Manajemen Laba.

Dosen Pembimbing 1 : Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO

Dosen Pembimbing 2 : Afriyadi, ST., ME

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX PLANNING, UNBILLED RECEIVABLES, AND CASH FLOW TURN ON PROFIT MANAGEMENT ON CONSUMER GOODS COMPANIES LISTED ON IDX

Gibson Radityo Lim. 18622204. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
gibsonlim55@gmail.com

Companies that are founded must have a purpose, one of which is to make a profit. Although there are also companies that were founded with a non-profit purpose, most of the companies around us were definitely founded for profit. Therefore, most companies must have workers or experts who can project and develop plans to improve the company's performance. The purpose of this study was to determine the effect of tax planning, bad debts, and cash flow turnover on earnings management in consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

The sample in this study consisted of 14 consumer goods companies with an observation period from 2018-2021. Sample selection using purposive sampling method. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis method. The data used is secondary data. The tool used to test panel data regression analysis, classic assumption test, and hypothesis testing using EViews 12.

The results of this study indicate that tax planning partially has no effect on earnings management, bad debts has a partially negative effect on earnings management, cash flow turnover partially has a positive effect on earnings management. Tax planning, bad debts and cash flow turnover simultaneously affect earnings management.

The advice for companies that researchers can give is that companies can pay more attention to earnings management so that in implementing it can bring the company to a better direction.

Keywords: Tax Planning, Uncollectible Accounts, Cash Flow Turnover, Earnings Management.

Dosen Pembimbing 1 : Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO

Dosen Pembimbing 2 : Afriyadi, ST., ME

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya, perusahaan yang didirikan pasti memiliki suatu tujuan, salah satunya yaitu untuk memperoleh laba. Meskipun ada juga perusahaan yang didirikan dengan tujuan nirlaba, akan tetapi kebanyakan perusahaan yang ada disekitar kita pasti didirikan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan harus memiliki tenaga kerja atau tenaga ahli yang dapat memproyeksikan dan menyusun rencana untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.

Perusahaan yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba memiliki berbagai cara untuk selalu meningkatkan laba perusahaan salah satunya dengan IPO(*Initial Public Offering*) atau yang biasa disebut dengan *go public*. Proses *go public* ini dilakukan dengan menawarkan saham kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan dana sehingga perusahaan dapat mengekspansi usahanya agar dapat meningkatkan laba dibandingkan dengan laba pada tahun sebelumnya.

Setelah perusahaan *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka terdapat dua pihak yang memerlukan laporan keuangan perusahaan yaitu pihak *internal* dan *eksternal*. Untuk dapat memberikan laporan keuangan yang selalu dapat menunjukkan pertumbuhan laba kepada pihak *internal* dan *eksternal* supaya pihak *eksternal* akan menginvestasikan uangnya lagi kepada perusahaan dan pihak *internal* dapat meningkatkan kekayaannya.

Manajemen laba merupakan upaya yang dijalankan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk melakukan intervensi pada saat menyusun laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan pihak perusahaan yang bersangkutan. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* Scoot (2000). Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Aditama and Purwaningsih (2014)

Dengan adanya tenaga kerja dari pihak manajemen untuk meningkatkan laba usahanya, maka pihak manajemen harus menekan resiko piutang tidak tertagih, menganalisis proses perputaran arus kas dan merencanakan beban pajak sekecil mungkin agar perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran biaya beserta kerugian dari piutang tidak tertagih dan meningkatkan laba perusahaan sesuai yang diharapkan oleh pihak manajemen.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari masyarakat untuk membiayai keperluan negara seperti pembangunan infrastruktur, namun bagi perusahaan beban pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga kebanyakan perusahaan akan merencanakan pajak. Hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan sebelum merencanakan pajak adalah perusahaan harus dapat membedakan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara *legal* dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, pada teknik ini digunakan dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara *illegal*. *Illegal* yang dimaksud adalah teknik ini melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, misalnya dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan penghasilan namun tidak dilaporkan keseluruhannya sesuai keadaan yang sebenar-benarnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan laba usaha adalah dengan menurunkan pajak penghasilan dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menekan pajak penghasilannya melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis, namun harus diperhatikan juga untuk perencanaan pajak ini adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal untuk merencanakan pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun dapat menekan jumlah pajak yang terutang supaya hasil dari perencanaan tersebut dapat digunakan untuk perputaran bisnis sehingga dapat meningkatkan laba usaha. Proses perencanaan pajak ini harus dilakukan dengan benar tanpa memalsukan bukti pendukung atau data lainnya, apabila melanggar undang-undang ketentuan perpajakan yang berlaku

di Indonesia maka akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang membuat perencanaan pajak gagal dan akibatnya menimbulkan denda atau sanksi perpajakan lainnya.

Penekanan jumlah pajak yang terutang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang undang perpajakan atau bisa disebut juga sebagai loopholes sehingga tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak dapat juga diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Peningkatan laba usaha dapat juga dilakukan dengan meminimalisir resiko kerugian piutang tidak tertagih. Pada saat terjadi penjualan secara kredit maka akan menimbulkan piutang kepada pihak penjual dan menimbulkan hutang di pihak pembeli, sehingga pemberian piutang ini memiliki resiko yang besar, karena bisa saja terjadi kredit macet karena piutang yang diberikan tidak dapat dilunaskan tepat waktu.

Proses penagihan piutang memiliki resiko akan kemungkinan piutang tersebut tidak dapat tertagih lagi dan terkadang resiko ini tidak dapat dihindari sehingga perusahaan harus menanggung beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang ini memiliki dampak pada laba perusahaan sehingga dapat membuat laba perusahaan menurun oleh karena itu, pihak manajemen harus memberikan perhatian khusus pada beban kerugian piutang.

Apabila suatu piutang diprediksi tidak dapat tertagih lagi maka biasanya perusahaan dapat menerapkan dua metode penghapusan untuk dibebankan dalam beban operasional yaitu metode penyisihan dan metode penghapusan langsung. Pada metode penyisihan pihak manajemen memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat dibayar oleh debitur. Pada metode penghapusan langsung perusahaan melakukan pencatatan kerugian ketika debitur sudah tidak dapat lagi membayar piutang tersebut.

Menganalisis perputaran arus kas juga dapat memperoleh informasi untuk mengetahui penerimaan, pengeluaran, dan perubahan bersih pada kas akibat dari aktivitas operasi. Setelah di analisis maka dapat diketahui apakah ada pengeluaran yang berlebihan atau penerimaan yang tidak wajar. Hasil ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk merencanakan laba perusahaan agar perputaran kas dapat berjalan dengan stabil.

A.A Gede Raka Plasa Negara & L.D.G. Dharma Suputra (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dalam penelitiannya A.A Gede Raka Plasa Negara & L.D.G. Dharma Suputra menggunakan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sebagai variabel *independent* dan manajemen laba sebagai variabel *dependen*.

Tabel 1.1
Manajemen Laba

Kode	2018	2019	2020	2021
DVLA	0,017493	0,009725	-0,02369	-000566
HMSP	0.001577	0.000424	-0.02104	-0.00825
KINO	0.013346	0.084144	-0.08202	-0.00334
PEHA	0.003400	-0.01312	-0.05940	-0.02624
UNVR	0.024675	-0.02477	-0.00357	-0.02506

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan BEI, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perusahaan di bursa efek indonesia yang melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba secara konsisten dari tahun ke tahun. Manajemen laba dengan menurunkan laba mengakibatkan pajak yang dibayarkan lebih rendah. Dengan menurunkan laba dibandingkan dengan nilai yang seharusnya dapat mengakibatkan keraguan investor karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan berkemungkinan tidak mengalami kenaikan yang drastis.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, dengan ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, Piutang Tidak Tertagih dan Perputaran Arus Kas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan *Consumer Goods* yang Terdaftar di BEI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?
2. Apakah piutang tidak tertagih berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?
3. Apakah perputaran arus kas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?
4. Apakah perencanaan pajak, piutang tidak tertagih dan perputaran arus kas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada :

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 s/d 2021

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?
2. Untuk mengetahui apakah piutang tidak tertagih berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?

3. Untuk mengetahui apakah arus kas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?
4. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak, piutang tidak tertagih dan perputaran arus kas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Dapat memberikan gambaran tentang pengaruh perencanaan pajak, piutang tidak tertagih, dan perputaran arus kas terhadap manajemen laba.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai hasil penelitian.

b) Bagi Akademik

Sebagai bahan untuk referensi dari penelitian terdahulu kepada peneliti di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami dengan baik. Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai landasan-landasan teori yang berkaitan dengan penyusunan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi hasil pengolahan data penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stakeholders Theory*(Teori Pemangku Kepentingan)

Menurut Ghozali (2020) *Stakeholder Theory* diperkenalkan pertama oleh Freeman dan menyarankan agar manajer menerapkan kosakata berdasarkan konsep pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan menyarankan bahwa jika kita mengadopsi sebagai unit analisis hubungan antara bisnis dan kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh olehnya maka kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menangani secara efektif ketiga masalah ini. Pertama, dari perspektif pemangku kepentingan, bisnis dapat dipahami sebagai sekumpulan hubungan antar kelompok yang memiliki hubungan dalam aktivitas yang membentuk bisnis tersebut. Komunitas dan manajer berinteraksi untuk bersama-sama menciptakan dan memperdagangkan nilai. Untuk memahami bisnis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja dan berubah seiring waktu. Merupakan tugas eksekutif untuk mengelola dan membentuk hubungan ini untuk menciptakan nilai sebanyak mungkin bagi pemangku kepentingan dan untuk mengelola distribusi nilai tersebut. Jika berkepentingan para stakeholder bertentangan, eksekutif harus menemukan cara untuk memikirkan kembali masalah sehingga kebutuhan kelompok pemangku berkepentingan yang luas dipenuhi. Jika *trade-off* harus dilakukan, seperti yang kadang-kadang terjadi, maka

eksekutif harus mencari cara untuk membuat *trade-off*, dan kemudian bekerja untuk meningkatkan *trade-off* untuk semua sisi.

Kedua meskipun manajemen hubungan pemangku kepentingan yang efektif membantu bisnis bertahan dan berkembang dalam sistem kapitalis, ini juga merupakan upaya moral karena menyangkut pertanyaan tentang nilai, pilihan dan potensi bahaya dan manfaat bagi sekelompok besar kelompok dan individu. Akhirnya, deskripsi manajemen yang memfokuskan perhatian pada penciptaan, pemeliharaan, dan penyelarasan hubungan pemangku kepentingan dengan lebih baik melengkapi praktisi untuk menciptakan nilai dan menghindari kegagalan moral.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur, perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*. Organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

2.1.2 Manajemen Laba

Menurut Fahmi (2014), manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya Scott (2015) menjelaskan bahwa manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi, atau aksi nyata, yang mempengaruhi laba sehingga mencapai sasaran dengan melaporkan laba tertentu.

Fischer & Rosenzweig Sulistyanto (2014) mengartikan manajemen laba sebagai tindakan-tindakan manajer yang dimaksudkan untuk memperbesar atau memperkecil laba bersih yang dilaporkan sekarang tanpa menimbulkan kenaikan atau penurunan profitabilitas ekonomis perusahaan dalam jangka panjang.

Adapun definisi manajemen laba menurut Lewitt Sulistyanto (2014), manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer

Menurut Ningsih and Jogi (2018) manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi yang mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk mempengaruhi

dan mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba dapat juga dikatakan sebagai tindakan yang mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar dapat mencapai informasi laba tertentu yang diharapkan. Untuk menurunkan laba di periode ini dan juga agar dapat mencapai target laba tertentu, agar dapat menaikkan pendapatan di periode mendatang, biasanya manajemen perusahaan akan melakukan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan menaikkan laba.

Laba perusahaan yang telah diatur sesuai dengan kepentingan manajemen maka manajemen perusahaan akan memanfaatkan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Manajemen laba dapat juga diartikan sebagai praktik atau tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk sebuah pencapaian beberapa tujuan pelaporan laba tertentu.

Ada dua sifat manajemen laba. Yang pertama, manajemen laba yang bersifat efisien dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang diterbitkan. Yang kedua, manajemen laba yang bersifat oportunistik akan merugikan para pengguna laporan keuangan karena tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pada kenyataannya manajemen laba bukan merupakan suatu praktik atau tindakan yang dilarang dalam akuntansi. Hal ini dikarenakan manajemen laba bukan merupakan suatu tindakan penipuan, *fraud* atau tindakan kejahatan lainnya selama tindakan manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam metode akuntansi. Tetapi jika suatu perusahaan melakukan tindakan manajemen laba terlalu tinggi maka dampaknya akan merugikan pihak investor yang sudah percaya pada laporan keuangan yang telah dimanipulasi, karena

investor telah menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dengan harapan timbal balik laba yang tinggi.

Jika dilihat, sisi baik dari manajemen laba adalah dari segi kontraktor dan perspektif pelaporan keuangan, yaitu perspektif kontrak dengan mengukur sejauh mana laba manajemen dapat berhubungan baik dengan kontrak yang efisien versus oportunistik bentuk teori akuntansi positif dan tentunya berdasarkan kontrak efisien yang diinginkan untuk memberikan kemampuan dalam mengelola pendapatan dalam menghadapi kontrak kepada manajer. Selain itu, sisi buruk dari manajemen laba adalah dapat mengaburkan informasi kinerja ekonomis perusahaan, dan kontroversi manajemen laba kerap dikaitkan dengan etika atau moral karena tindakan tersebut akan menyesatkan pemakai laporan keuangan.

Terdapat beberapa pola manajemen laba yaitu *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization*, dan *income smoothing*.

a. *Taking a bath*

Pola ini biasanya terjadi pada periode dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi atau melakukan restrukturisasi. Pola *taking a bath* atau *big bath* adalah praktik manajemen laba dengan menghapus aset-aset yang menimbulkan biaya di masa depan. Pembalikan akrual akan meningkatkan kemungkinan laba yang dilaporkan di masa depan, dengan kata lain menyimpan cadangan laba untuk masa depan. Cadangan laba ini bisa dimanfaatkan beberapa waktu kemudian ketika pengawasan dewan terhadap manajemen laba agresif sudah

berkurang dan hak opsi sudah bisa digunakan. Pemanfaatan cadangan laba pada periode ini akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh *CEO*.

b. *Income minimization*

Manajemen laba dilakukan dengan penghapusan aset kapital dan aset tak berwujud. Salah satu pertimbangan dalam menurunkan laba adalah peraturan pajak dan motivasi politis. Manajer cenderung konservatif di awal masa jabatannya. Upaya untuk meminimalkan laba ini bisa dilakukan *CEO* di awal masa jabatannya untuk menyimpan cadangan laba. Cadangan laba ini bisa dimanfaatkan *CEO* ketika memasuki periode dimana pengawasan dewan terhadap manajemen laba agresif sudah berkurang serta hak opsi sudah bisa digunakan. Praktik ini akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh *CEO*.

c. *Income maximation*

Praktik manajemen laba ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus dan menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang. Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba akan mendorong manajer untuk memaksimalkan laba. Salah satu upaya untuk memaksimalkan laba tersebut adalah dengan memanfaatkan praktik manajemen laba.

Praktik manajemen laba ini dimanfaatkan *CEO* beberapa waktu setelah menjabat, yaitu ketika pengawasan dewan terhadap manajemen laba agresif sudah berkurang, kemampuan manajer sudah semakin terasah melalui pengalaman, dan hak opsi sudah bisa digunakan. Periode penggunaan hak opsi ini merupakan periode dimana masa tunggu atau vesting period sudah terlewati.

d. *Income smoothing*

Ada berbagai alasan yang mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba ini. Dilihat dari segi kompensasi, manajer yang tidak menyukai risiko mungkin melakukan *income smoothing* untuk mendapatkan kompensasi yang relative konstan. Dilihat dari segi perjanjian utang, *income smoothing* dilakukan untuk mengurangi ketidakstabilan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap perjanjian utang.

Manajer juga melakukan *income smoothing* untuk mengurangi risiko dipecat karena *income smoothing* mengurangi kemungkinan lab ayang dilaporkan rendah. Terakhir, *income smoothing* dilakukan untuk menyampaikan kekuatan *earnings persistence* kepada pasar. Manajemen laba dilakukan oleh manajer didorong oleh beberapa motivasi. Faktor faktor berikut ini merupakan hal hal yang dapat mendorong tindakan manajer dalam melakukan kegiatan manajemen laba menurut Scott (2009) antara lain :

1. *Bonus scheme* (Rencana bonus)

Laba perusahaan kerap dijadikan indicator penilaian prestasi manajer perusahaan. Penerapan *bonus scheme* akan membuat para manajer yang bekerja dalam perusahaan tersebut melakukan upaya memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterima dengan mengatur laba yang dilaporkannya.

2. *Debt covenant* (Kontrak utang jangka panjang)

Metode akuntansi yang dapat menggeser laba periode mendatang ke periode berjalan cenderung dipilih oleh para manajer dengan harapan dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak hutang. Hal ini biasanya terjadi ketika perusahaan semakin mendekati waktu pelanggaran perjanjian hutang.

3. *Political motivation (Motivasi public)*

Agar dapat memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah, terutama pada saat periode kemakmuran yang tinggi, manajer pada perusahaan-perusahaan skala besar dan industry strategis cenderung untuk menurunkan laba.

4. *Taxation motivations (Motivasi perpajakan)*

Dengan meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka para manajer akan mengurangi laba yang dilaporkan.

5. *Chief executive officer (Pergantian CEO)*

Upaya memaksimalkan jumlah laba untuk meningkatkan jumlah bonus yang akan diterima biasanya akan dilakukan oleh *CEO* yang masa jabatannya akan segera berakhir. Demikian juga halnya para manajer dengan kinerja yang buruk, mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan untuk menghindari diri dari pemecatan.

6. *Initial public offering (Penawaran saham perdana)*

Manajer akan berusaha menaikkan besaran laba yang dilaporkan untuk mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh investor. Oleh karena itu, informasi keuangan perusahaan yang sahamnya dijual kepada public merupakan sumber informasi penting karena hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial

Model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Healy, De Angelo, Model Jones serta model Jones dengan Modifikasi :

1. Model Healy (1985) Healy mengembangkan manajemen laba dengan menghitung nilai total akrual (TAC) dengan mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode berikutnya.
2. Model De Angelo (1986) Model De Angelo mengembangkan manajemen laba juga dengan menghitung total akrual (TAC) dengan mengurangi laba akuntansi dengan arus kas periode bersangkutan.
3. Model Jones (1991) Jones menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan, yaitu :
 1. Akrual periode berjalan, yaitu perubahan dalam rekening modal kerja, dimana hal tersebut merupakan hasil dari perubahan yang terjadi dilingkungan ekonomi perusahaan yang dihubungkan dengan perubahan penjualan. Sehingga seluruh variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya; dan
 2. *Gross property, plant dan aquipment* merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung total akrual, khususnya untuk biaya depresiasi *non discretionary*.
4. Model Jones Dimodifikasi (1995) Dechow, Sloan, dan Sweeney menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dan akrual yang tidak diharapkan. Model ini menggunakan

discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini mempunyai kelebihan dalam memecah total akrual menjadi empat komponen utama akrual, yaitu *discretionary current accruals* dan *discretionary long-term accruals*.

2.1.3 Definisi Pajak

Menurut S.I Djajadiningrat Priantara (2013), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Prof. Dr. P.J.A. Andriani Pandiangan (2014) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya Prof. H. Rochmat Soemitro, SH Prasetyono (2012) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, sehingga menjadi

berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak memiliki fungsi penting yang sangat berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam proses kegiatan membangun karena pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membayar semua pengeluaran termasuk pengeluaran dalam proses kegiatan pembangunan. Di negara hukum, ketentuan pemungutan pajak harus memiliki landasan hukum, jika tidak memiliki landasan hukumnya maka pemungutan yang dijalankan oleh negara bukan termasuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pemungutan liar.

Keberadaan Pajak ada dikarenakan manfaat pajak yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara, dikarenakan negara harus menyediakan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakatnya, sehingga negara membuat pajak untuk memperoleh dana agar dapat digunakan untuk melindungi dan melayani masyarakatnya. Posisi pajak sendiri merupakan penopang negara, sehingga bangsa Indonesia yang terdapat 33 provinsi memiliki potensi sebagai penopang ekonomi negara melalui pemungutan pajak.

Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan seperti pajak bumi dan bangunan, sebagai rakyat bangsa Indonesia kita wajib membayar pajak bumi dan bangunan karena kita bertempat tinggal di wilayah negara. Membiayai belanja modal yaitu belanjaan pegawai, barang, membangun keperluan umum. Pajak yang

diperoleh dari pemerintah pusat juga di salurkan ke tempat terpencil agar proses kegiatan pembangunan di daerah tersebut berjalan dengan lancar.

2.1.4 Definisi Hukum Pajak

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara sebagai pusat pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal ini menunjukkan kalau di bidang perpajakan akan berhadapan dua subjek hukum, ialah negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak karena keduanya berstatus sebagai subjek hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan undang-undang perpajakan.

Tujuan hukum secara umum banyak dikemukakan oleh para ahli, seperti Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, yang menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan. Selain untuk menciptakan keadilan, menurut para ahli, hukum juga bertujuan untuk memberikan ketertiban, kepastian hingga untuk memperoleh kebahagiaan. Sedangkan pada dasarnya tujuan hukum pajak secara umum adalah menciptakan keadilan didalam penagihan pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Menurut Azhar Basjir, MA, Konsep adil sangatlah sederhana yaitu meletakkan sesuatu di tempatnya masing-masing. Sedangkan keadilan adalah sifat yang adil. Jadi dapat disimpulkan keadilan adalah sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak pilih kasih atas sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan dan

kepedulian memahami aspek keadilan pajak menjadi sangat penting untuk terus disosialisasikan ke berbagai jenjang masyarakat .

Menurut (Adam Smith) dalam karya tulisnya yang diberikan judul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* melancarkan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemecahan tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing baiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yaitu setingkat dengan pendapatan yang diperoleh masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas ini tidak diperkenankan suatu organisasi seperti negara memiliki diskriminasi antara sesama wajib pajak. Dalam situasi yang sama, wajib pajak juga wajib diberikan pajak yang sesuai dengan kondisi dan sesuai kemampuan wajib pajak masing-masing.
2. Pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak harus terbuka dan tidak mengenal kompromis. Dalam asas ini, kepastian hukum yang sangat penting adalah tentang subjek, objek, nilai pajak, dan peraturan tentang waktu pembayarannya.
3. Teknik penagihan pajak yang disarankan ini juga dikenal sebagai *convenience of payment*, yang memutuskan pajak seharusnya dipotong ketika saat diterimanya pendapatan tersebut.
4. Asas ini memutuskan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan sehemat-hematnya, sehingga dapat menghindari terjadinya biaya pemungutan lebih besar dibandingkan dengan pemasukan pajaknya.

2.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014) terdapat beberapa fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber penghasilan negara, pajak memiliki tujuan untuk keperluan pengeluaran negara. Untuk menjalankan kewajiban rutin negara dan menjalankan proses pembangunan, untuk menjalankannya. maka dibutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penghasilan yang diterima pada pajak. Saat ini pajak dipakai untuk kepentingan rutin seperti pembelian keperluan pegawai, pembelian barang, pemeliharaan, dan keperluan lainnya. Untuk keperluan membangun negara, uang dibebankan ke tabungan negara yaitu penghasilan dalam negeri dikurangi dengan biaya rutin. Tabungan negara ini dari masa ke masa harus meningkat sesuai keperluan pembebanan pembangunan yang semakin tinggi seiring dengan berjalannya waktu dan ini yang diinginkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak dapat dipakai sebagai metode untuk merealisasikan tujuan tersebut. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik yang terjadi dalam negeri maupun luar negeri diberikan beragam fasilitas berupa keringanan pajak. Dengan tujuan agar dapat melindungi proses produksi dalam negeri, pemerintah juga menetapkan bea masuk yang besar untuk produk pada luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki aset untuk melaksanakan kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat terjadi dengan cara mengendalikan peredaran aset di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah diterima oleh negara akan dipakai untuk membebaskan semua keperluan umum, termasuk juga untuk membiayai proses pembangunan agar terdapat kesempatan kerja yang akhirnya tujuan akhirnya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mustaqiem (2014) untuk membebaskan pajak kepada masyarakat sangat sulit, karena jika dibebankan sangat tinggi, wajib pajak akan tidak ingin membayar pajak, tetapi jika pembebanan terlalu kecil, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar karena dana yang kurang, supaya tidak menyebabkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus terpenuhi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Produk hukum pajak juga memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan pajak kepada wajib pajak. Adil dalam undang-undang ataupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- Mengatur hak dan kewajiban wajib pajak

- Pajak berlaku kepada setiap masyarakat yang syaratnya terpenuhi sebagai wajib pajak
- Akibat atas pelanggaran pajak berlaku secara umum tergantung tingkatan pelanggarannya.

2. Pemungutan pajak harus undang-undang

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, hal tersebut perlu dipantau dalam proses pada saat menyusun Undang-undang tentang pajak, yaitu

- Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara harus dijamin kelancarannya.
- Jaminan hukum bagi wajib pajak agar tidak diperlakukan secara umum.
- Jaminan hukum agar kerahasiaan bagi para wajib pajak dapat terjaga.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak wajib dirancang demikian rupa agar kondisi perekonomian tidak terganggu, baik dalam proses kegiatan produksi, perdagangan, ataupun jasa. Pemungutan pajak sehingga tidak menyebabkan rugi pada kepentingan masyarakat dan memperlambat usaha masyarakat yang membayar iuran tersebut, terutama wajib pajak kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya yang timbul dalam ketika proses penagihan pajak harus diperkirakan. Agar pajak yang diterima lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, proses penagihan pajak harus gampang dan mudah dijalankan. Dengan begitu, dalam pembayaran pajak wajib pajak tidak akan kesulitan, baik pada segi penghitungannya maupun waktu yang dihabiskan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Cara pajak dipungut berpengaruh pada keberhasilan dalam proses penagihan pajak. Sistem yang sederhana akan mempermudah wajib pajak ketika menghitung biaya pajak yang masih harus dibayar agar dapat memberikan hal yang positif bagi wajib pajak supaya meningkatkan kesadaran pada saat pembayaran pajak. Apabila sebaliknya, maka masyarakat akan semakin menolak membayar pajak.

2.1.7 Pajak Penghasilan

Menurut Mustaqiem (2014) Sejarah dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia terjadi ketika adanya *tenement tax* pada tahun 1816, yaitu pajak yang diberikan ketika sewa kepada masyarakat yang memakai bumi sebagai tempat berpijaknya bangunan atau rumah. Pada masa tersebut hingga tahun 1908 memiliki perbedaan tindakan perpajakan antara penduduk asli dengan warga asia dan warga eropa, istilahnya terdapat ketidaksamaan dan tidak terdapat uniformitas pada perlakuan perpajakan. Tercatat beberapa pajak yang hanya berlaku kepada warga eropa seperti "*patent duty*".

Di samping itu, dari tahun 1882 hingga 1916 terkenal dengan istilah *poll tax* yang perpajakannya dikenakan berdasarkan pemilikan rumah, tanah dan status pribadi. Ketika tahun 1908 ada juga yang dinamakan dengan ordonansi pajak penghasilan yang dikenakan kepada warga eropa, dan perusahaan yang menjalankan berbagai kegiatan bisnis dan tidak memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya ialah pendapatan yang didapati dari barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, pendapatan dari usaha, pendapatan pejabat pemerintah, pensiunan dan pembayaran berkala. Tarifnya berdasarkan proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar jika kriteria tertentu sudah tercapai.

Kemudian, ketika tahun 1920 dilaksanakan sebagai tahun unifikasi, yang mana dualistik yang telah ada selama ini, dihilangkan dengan memperkenalkan *General Income Tax* yaitu ordonansi pajak penghasilan yang diperbaharui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang wajib dilaksanakan baik oleh penduduk asli, warga asia maupun warga eropa. Dalam ordonansi pajak penghasilan ini telah dijalankan asas-asas pajak penghasilan yaitu asas keadilan, asas domisili dan asas sumber. Karena kebutuhan yang semakin banyak perusahaan yang didirikan pada Indonesia seperti perkebunan (*onderneming*) saat tahun 1925 diputuskanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschap belasting) yaitu pajak yang diberikan pada laba perusahaan, yang dikenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan).

Ordonansi PPs 1925 diberlakukan hingga tanggal 31 Desember 1983, yaitu ketika diadakannya tax reform, Saat awal tahun 1925-an yaitu dengan mulai

berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan berkembangnya pajak penghasilan pada Negeri Belanda, maka timbul keperluan untuk mengubah ordonansi pajak penghasilan 1920, yaitu dengan ditetapkannya ordonansi pajak penghasilan pada saat 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111) yang diberlakukan kepada orang pribadi (Personal Income Tax).

Asas-asas pajak penghasilan sudah dijalankan kepada masyarakat Indonesia, kepada warga diluar Indonesia cuma diberikan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Ordonansi ini sudah mengenal asas domisili dan asas sumber. Dikarenakan semakin banyak perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga keperluan akan pengenaan pajak terhadap penghasilan karyawan perusahaan muncul. Maka ketika tahun 1935 dibuatlah Ordonansi Pajak Upah (loonbelasting) yang membuat pimpinan memiliki kewajiban memotong Pajak Upah atau gaji pekerja yang memiliki tarif progresif dari 0% hingga 15%. Pada saat Perang Dunia ke-2 perlakuan Oorlogsbelasting (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan saat tahun 1946 diubah lagi dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 panggilan Pajak Peralihan diubah menjadi nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan biasanya disingkat menjadi PPd.

Hal yang memiliki hubungan dengan pajak salah satu contohnya seperti Pajak Penghasilan merupakan warisan dari sejarah. Dengan proses yang panjang yang diisi dengan peperangan dan luka, pajak telah membawa kita ke masa kini dimana pajak merupakan alat yang efektif dan efisien untuk membebaskan pengeluaran masyarakat untuk kepentingan masyarakat.

2.1.8 Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013), perencanaan pajak adalah adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang merupakan suatu proses mengorganisasi utang pajak agar berada dalam jumlah minimal selama tidak melanggar undang-undang.

Suandy (2017) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai suatu langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak dengan strategi yang akan dilakukan

Selanjutnya Hidayat (2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.

Definisi menurut Harnanto (2013), perencanaan pajak yaitu minimalisasi penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi penghasilan kena pajak di kemudian hari. Proses minimasi penghasilan kena pajak atau pajak penghasilan terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan dalam membuat keputusan menyangkut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Menurut Aditama and Purwaningsih (2014) perencanaan pajak merupakan langkah pertama ketika ingin melakukan manajemen pajak. Suandy (2008)

mendefinisikan perencanaan pajak atau dikenal juga sebagai *tax planning* sebagai proses menjalankan usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak agar utang pajak seperti PPh ataupun biaya pajak lainnya dapat ditekan sekecil mungkin. Sekecil mungkin namun perlu diperhatikan agar masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, agar proses perencanaan pajak (*tax planning*) ini dibenarkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dijalankan dengan memulai mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang masih berlaku agar dapat dipelajari jenis penghematan yang dapat dilakukan selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Lumbantoruan (1996:483) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen pajak merupakan media untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan dan likuiditas yang akan diharapkan oleh para pemilik modal atau saham perusahaan.

2.1.9 Teori dan Praktik Akuntansi

Menurut Ghozali (2014:51) pengertian yang paling sederhana untuk akuntansi adalah hal yang dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntansi sebenarnya bukan merupakan ilmu pengetahuan murni. Dikarenakan terdapat penerapan berbagai prosedur akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan, sangat bergantung pada kondisinya dan dapat terpengaruhi oleh berbagai faktor pertimbangan tertentu. Pendekatan lain yang dianalisa untuk menjelaskan akuntansi adalah pendekatan yang melihat bahwa akuntansi adalah proses mengukur,

mengkomunikasikan dan mengidentifikasi informasi untuk mempermudah pengguna dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan kalau teori akuntansi memerlukan praktik karena tujuannya adalah memberitahukan praktik akuntansi dapat dijalankan dan memberikan dasar bagi proses berkembangnya praktik tersebut. Teori akuntansi dapat dikatakan juga dengan suatu konsep modern jika dibandingkan dengan teori lain seperti matematika atau fisik. Chambers(1994) menjelaskan bahwa akuntansi dibuat dan dikembangkan dari model yang rinci bukan semata-mata dikembangkan secara sistematis dari teori yang terstruktur.

2.1.10 Standar Akuntansi di Indonesia

Pelaporan laporan keuangan pada negara Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan dan saat ini memakai standar akuntansi internasional yang diluncurkan oleh *international accounting standard board*. Standar akuntansi keuangan di Indonesia lebih sering dikembangkan dengan pendekatan *principle-based standards* bukan *US rule-based standards*. Dalam *principle-based standards*, standar akuntansi memberikan informasi yang sifatnya umum. Sedangkan dalam *rule-based standards*, merupakan informasi yang mengatur setiap situasi bisnis. Aturan menggantikan *professional judgement* sehingga mementingkan bentuk hukum dan mengabaikan substansi ekonominya.

Menurut Ghozali (2014:125) dalam penyusunan standar akuntansi memiliki lima tahapan, yaitu

1. *Design*

Aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi, diteliti, dan exposure draft disiapkan

2. *Approval*

Draft tersebut dilihat kembali dan jika layak akan disetujui sebagai standar

3. *Education*

Penjelasan kepada penyusun dan memakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru

4. *Implementation*

Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan

5. *Enforcement*

Pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan.

Penyusunan standar akuntansi pada Indonesia sendiri mengacu pada model Amerika dengan sedikit modifikasi. Menurut peraturan yang sesuai dengan dewan standar akuntansi keuangan, proses penyusunan standar akuntansi keuangan memiliki delapan tahap berikut :

1. *Issue Identification*

Kongres IAI yang rapat setiap empat bulan memberikan resolusi tentang program kerja strategis DSAK. DSAK ini memantau dan merencanakan pengumuman resmi yang diluncurkan oleh international accounting standard board dan badan perumus standar akuntansi lainnya serta melihat kembali pendapat yang diterima dari pihak yang hadir.

2. *Preliminary Consideration*

DSAK membahas poin yang ada dan komisi yang diperlukan serta menjalankan penelitian kepada poin yang ada sebelum poin tersebut dimasukkan dalam program kerja DSAK.

3. *Preparation of Accounting Discussion Paper*

Untuk topik yang diterima, DSAK membentuk komite khusus untuk menyiapkan topic outline dan accounting discussion paper yang secara rinci memberitahukan dan menganalisis topik tersebut.

4. *Preparation of Exposure Draft*

Atas dasar pemikiran yang terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan ED awal yang konsisten dengan kerangka standar akuntansi internasional. ED awal ini disalurkan ke pihak yang memiliki pengaruh untuk mengetahui pendapat pihak tersebut.

5. *Publication of ED*

ED diluncurkan pada media akuntansi majalah IAI dan disalurkan kepada pihak yang memiliki pengaruh paling lambat 1 bulan sebelum mulainya public hearing

6. *Public Hearings*

Tujuan *Public hearing* diselenggarakan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkeperluan untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap ED tersebut. Atas tanggapan tersebut, DSAK akan berdiskusi dengan pemerintah, organisasi dan individu yang relevan sebelum disahkan menjadi PSAK.

7. *PSAK Preparation*

Jika perlu, DSAK merubah ED untuk merefleksikan hasil diskusi yang telah dilakukan,

8. *Approval and Promulgation*

DSAK melakukan persetujuan PSAK untuk diluncurkan sebagai panduan resmi praktik akuntansi tertentu. PSAK yang disetujui diluncurkan melalui media akuntansi dan website IAI.

Penyusunan standar pada Indonesia dapat digolongkan kedalam dua periode yaitu periode sebelum kongres VIII ikatan akuntan Indonesia pada saat September 1998. Periode setelah kongres diputuskan perubahan mendasar dalam proses penyusunan standar akuntansi.

2.1.11 Konsep Aktiva

Menurut Ghozali (2014:246) Aktiva perlu didefinisikan untuk mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang harus dijelaskan dalam laporan neraca. Adapun karakteristik aktiva yaitu:

- Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang
- Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva
- Berkaitan dengan entitas tertentu
- Menunjukkan proses akuntansi
- Berkaitan dengan dimensi waktu
- Berkaitan dengan karakteristik keterukuran

2.1.12 Pengungkapan Informasi Kualitatif

Menurut Ghozali (2014:417) pada umumnya informasi yang diberi bobot lebih tinggi dalam pengambilan keputusan adalah yang lebih relevan dari pada informasi yang bobotnya lebih rendah. Oleh karena itu harus dicari suatu titik ketika dapat dikatakan bahwa suatu informasi cukup penting dalam pengambilan keputusan sehingga tidak boleh diabaikan. Relevansi dari jenis informasi kualitatif tertentu dapat ditetapkan dari relevansi data kuantitatif yang berkaitan dengannya. Seperti, jika aktiva tertentu digadaikan sebagai jaminan kepada kreditur, penggadaian itu akan merupakan fakta yang relevan jika nilai aktiva tersebut material. Apabila fakta tersebut tidak material, dengan sendirinya informasi deskriptif tersebut tidak relevan. Namun demikian, dalam beberapa kasus hal ini mungkin saja tidak benar, misalnya hilangnya sejumlah persediaan atau kas yang tidak material akan relevan jika hal tersebut disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan manajemen.

Pada umumnya terdapat lima macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu :

1. Ketidakpastian

Yaitu peristiwa yang berkemungkinan akan terjadi dimasa yang akan datang dan mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan perusahaan. Berbagai kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut seperti:

- Kemungkinan diterimanya uang yang berasal dari hadiah bonus dan lain sebagainya
- Kemungkinan diterimanya kembali uang yang berasal dari setoran pajak yang berlebihan jumlahnya
- Kemungkinan diterimanya ganti kerugian, berdasarkan keputusan pengadilan dari perkara atau tuntutan yang diajukan kepada pihak pengadilan.

2. Dasar penilaian dan kebijakan akuntansinya

Pengungkapan tentang dasar atau metode penilaian yang digunakan perusahaan seperti metode penilaian perusahaan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Salah satu pemecahan yang disarankan adalah dengan mengurangi alternatif-alternatif yang dapat dilakukan agar timbul keseragaman yang memungkinkan dilakukan perbandingan. Namun demikian pemilihan prosedur untuk semua perusahaan tidak saja merupakan pilihan yang sulit tetapi juga mungkin tidak dapat dicapai dalam kondisi yang berlainan.

3. Perubahan akuntansi

Yaitu pengungkapan terhadap perubahan atas kebijakan yang digunakan perusahaan seperti perubahan metode penilaian persediaan dari *FIFO* menjadi *LIFO* dan lainnya. Pemakaian yang konsisten dari prinsip dan prosedur akuntansi dan dalam proyeksi aktivitas di masa yang akan datang. APB Opinion No. 20 mendukung pandangan ini tetapi dengan menetapkan bahwa perubahan yang dilakukan harus diungkapkan dalam

laporan keuangan pada saat perubahan tersebut dibuat Bersama dengan penjelasan mengenai alasan atas perubahan tersebut. Perubahan-perubahan akuntansi meliputi perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan entitas pelaporan.

4. Keterikatan dengan kontrak atau perjanjian

Yaitu pengungkapan mengenai adanya pembatasan-pembatasan atau keterikatan dari satu atau lebih aktiva terhadap hutang/kontrak.

5. Peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca

Penjelasan tentang suatu kejadian yang telah terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan keuangan dipublikasikan merupakan informasi penting yang perlu diungkapkan. Informasi yang disajikan dalam neraca maupun rugi laba pada dasarnya bersifat tentatif karena adanya ketidakpastian dari peristiwa dimasa yang akan datang.

Dengan berlalunya waktu dan diperolehnya informasi tambahan, berbagai ketidakpastian diharapkan dapat dikurangi. Oleh karena itu, berbagai peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca kemungkinan dapat mempengaruhi validitas dan interpretasi terhadap laporan keuangan, dan hasil yang diperoleh dari keputusan yang didasarkan pada laporan tersebut. Apabila ada peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dan sebelum laporan keuangan dipublikasikan, informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dan sebelum laporan keuangan dipublikasikan antara lain :

- Peristiwa yang mempengaruhi secara langsung jumlah elemen yang disajikan dalam laporan keuangan
- Peristiwa yang dapat mengubah secara material validitas penilaian neraca atau hubungan diantara pemegang saham atau yang secara material mempengaruhi manfaat kegiatan yang dilaporkan tahun sebelumnya sebagai prediksi periode berjalan.
- Kejadian-kejadian yang mungkin mempengaruhi secara material operasi atau penilaian dimasa yang akan datang.

2.1.13 Piutang

Menurut Veronica Sihombing (2016) Piutang merupakan pos yang penting karena merupakan bagian aktiva lancar perusahaan yang besar. Di satu sisi piutang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena merupakan klaim perusahaan terhadap uang pelanggan, namun disisi lain piutang bisa menjadi kerugian bagi perusahaan karena adanya resiko yang tidak tertagih.

Menurut Mulyadi dalam penelitian Veronica Sihombing (2016) Piutang usaha adalah Piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Simamora Piutang merupakan klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi yang membentuk suatu hubungan di mana satu pihak berutang kepada lainnya”.

Piutang tidak tertagih adalah piutang yang dianggap sebagai utang konsumen atas transaksi bisnis yang wajar, akan tetapi piutang tersebut tidak dapat ditagih walaupun sudah dilakukan upaya penagihan oleh perusahaan. Menurut Soemarso dalam Mitayani (2016), terdapat dua metode dalam menghapus piutang tidak tertagih, yaitu:

1. Metode Penyisihan, merupakan pembebanan kemungkinan yang menjadikan suatu entitas mengalami rugi karena tidak tertagihnya piutang. Jumlah piutang yang tercatat merupakan suatu taksiran.
2. Metode Penghapusan Langsung, merupakan penghapusan piutang yang tidak akan dapat ditagih lagi oleh pihak manajemen perusahaan.

2.1.14 Laporan Arus Kas

Pengertian laporan arus kas menurut Kasmir (2012) yaitu laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan.

Menurut Hery (2012 : 9) laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas menurut Rudianto (2012 : 194) merupakan suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu dengan penjelasan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Menurut Aditama and Purwaningsih (2014) Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak atau dikenal juga sebagai *tax planning* sebagai proses menjalankan usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak agar utang pajak seperti PPh ataupun biaya pajak lainnya dapat ditekan sekecil mungkin. Sekecil mungkin namun perlu diperhatikan agar masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, agar proses perencanaan pajak (*tax planning*) ini dibenarkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dijalankan dengan memulai mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang masih berlaku agar dapat dipelajari jenis penghematan yang dapat dilakukan selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Lumbantoruan (1996:483) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen.

2.2.2 Hubungan Piutang Tidak Tertagih Terhadap Manajemen Laba

Menurut Ningsih and Jogi (2018) Manajer dapat melakukan manajemen laba melalui pos *bad debt expense* dengan kebijakan yang dimiliki oleh manajer dalam mengatur estimasi *allowance*. Estimasi *allowance* dapat dilakukan dengan dua metode yaitu persentase penjualan dan persentase piutang. Persentase berdasarkan penjualan ini ditetapkan melalui pengalaman masa lalu dan diaplikasikan terhadap persentase masa depan. Perhitungan melalui piutang didasarkan pada analisis kelompok umur piutang dan persentasenya, dengan menerapkan presentase berbeda untuk setiap kelompok umur piutang. Adapun manajer dapat melakukan manajemen laba karena manajer memiliki kebebasan dalam mengatur estimasi nilai dari *bad debt expense*. Manajer memiliki motivasi untuk menurunkan *bad debt expense* karena semakin besar angkanya akan mengurangi laba operasional perusahaan yang akan berarti merugikan manajer apabila laba perusahaan dijadikan acuan untuk melihat prestasinya. Manajer juga menurunkan *bad debt expense* untuk memenuhi target laba Jackson dan Liu (2010) dan menghindari kerugian Choi dan Lee (2016)

2.2.3 Hubungan Perputaran Arus Kas Terhadap Manajemen Laba

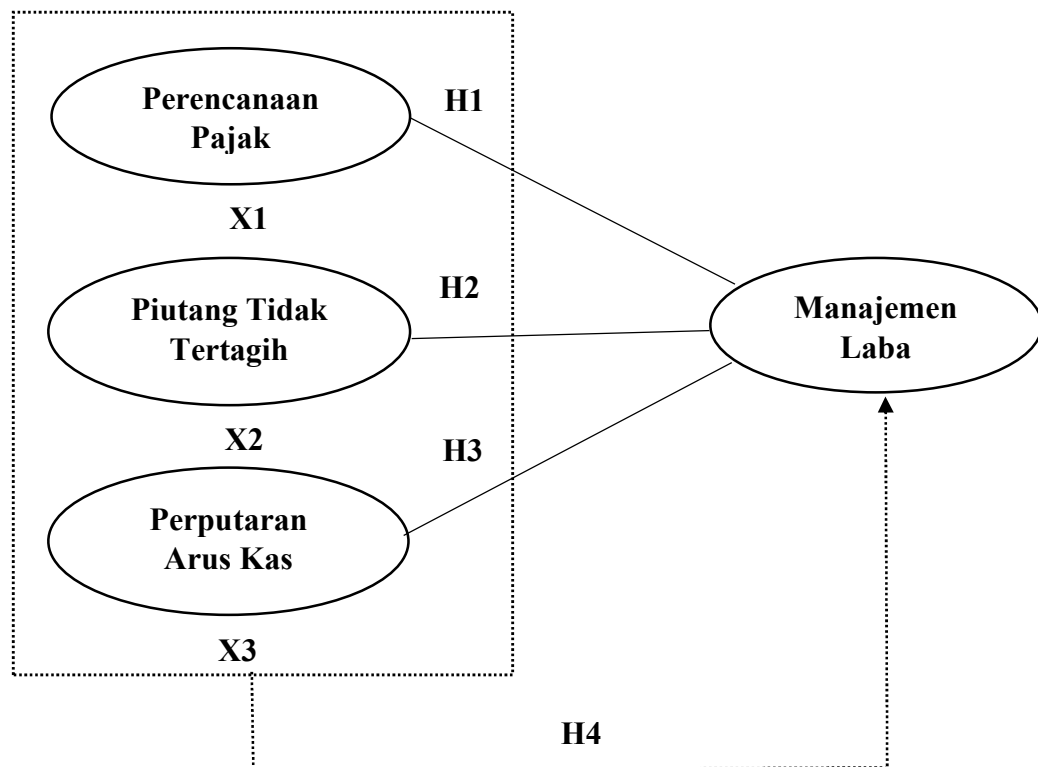
Menurut Rachman (2015) mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Total aset menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset meliputi aset lancar dan aset tidak lancar. Perputaran aset dapat menggambarkan kinerja

perusahaan. penelitian iskandar membuktikan bahwa *turnover asset* berpengaruh pada laba sebelum pajak (EBIT) yang dapat digunakan untuk memprediksi laba yang akan datang.

2.2.4 Hubungan Perencanaan Pajak, Piutang Tidak Tertagih, dan Perputaran Arus Kas Terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen laba, piutang tidak tertagih dapat memenuhi target laba, dan perputaran asset dapat menggambarkan kinerja perusahaan untuk memprediksi laba. Atas hal tersebut, ketiga variabel tersebut memiliki hubungan kuat yang mempengaruhi perusahaan dalam manajemen laba.

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Parsial ————— : Pengujian variabel secara parsial (pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat)

Simultan : Pengujian variabel secara simultan (pengaruh secara bersamaan variabel bebas terhadap variabel terikat)

Dari kerangka pemikiran diatas diperlihatkan bahwa manajemen laba sebagai variabel dependen diduga akan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu perencanaan pajak, piutang tidak tertagih dan perputaran arus kas.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H1 : Perencanaan pajak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba

H2 : Piutang tidak tertagih mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba

H3 : Perputaran arus kas mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba

H4 : Perencanaan pajak, piutang tidak tertagih, perputaran arus kas mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Aditama dan Purwaningsih (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Aditama and Purwaningsih (2014), menguji tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba.

2.5.2 Taufiqur Rachman (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2015), menguji tentang pengaruh perputaran aset terhadap praktek manajemen pada perusahaan sektor tambang batu bara. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perputaran aset berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.

2.5.3 Ningsih and Jogi (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih and Jogi (2018) menguji tentang manajemen laba terhadap pos *bad debt expense*. Penelitian ini menunjukkan manajemen pada *suspect firm* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dalam bentuk penurunan *bad debt expense*.

2.5.4 Lee and Choi (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Lee and Choi (2016) menguji tentang cadangan kerugian piutang. Penelitian ini menunjukkan penyisihan piutang tak tertagih berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.5.5 Ftouhi and Ghardallou (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Ftouhi and Ghardallou (2020) menguji tentang perencanaan pajak. Penelitian ini menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Hardani, S.Pd., M.Si. (2020) Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dibuat untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun hubungan yang akan digunakan adalah hubungan kausal yang berarti suatu hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel, yaitu variabel (X1) perencanaan pajak, (X2) piutang tidak tertagih dan (X3) perputaran arus kas terhadap (Y) manajemen laba pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani, S.Pd., M.Si. (2020) data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang tidak langsung seperti sumber tertulis dari pemerintah atau perpustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode tahun 2018-2021

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani, S.Pd., M.Si. (2020) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data dan apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti akan sulit untuk memenuhi standar data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Dokumentasi menurut Hardani, S.Pd., M.Si. (2020) adalah proses mengumpulkan data dengan mencatat data yang telah ada .

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Hardani, S.Pd., M.Si. (2020) populasi adalah seluruh objek penelitian yang terdiri dari makhluk hidup, benda mati, atau peristiwa sebagai sumber informasi yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Perusahaan *consumer goods* yang diambil terdapat 57 perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
3	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk.

4	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk.
5	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
6	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
7	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
8	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
9	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
10	DLTA	Delta Djakarta Tbk
11	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk.
12	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk.
13	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb
14	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
17	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk.
18	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
19	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.
20	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk.
21	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
22	MYOR	Mayora Indah Tbk
23	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tb
24	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
25	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk

26	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
27	SKBM	Sekar Bumi Tbk
28	SKLT	Sekar Laut Tbk.
29	STTP	Siantar Top Tbk.
30	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
31	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk.
32	GGRM	Gudang Garam Tbk.
33	HMSP	HM Sampoerna Tbk.
34	ITIC	Indonesian Tobacco Tbk.
35	RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk.
36	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
37	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
38	INAF	Indofarma (Persero) Tbk
39	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
40	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
41	MERK	Merck Tbk
42	PEHA	Phapros Tbk.
43	PYFA	Pyridam Farma Tbk
44	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
45	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
46	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.
47	KINO	Kino Indonesia Tbk

48	KPAS	Cottonindo Ariesta Tbk.
49	MBTO	Martina Berto Tbk.
50	MRAT	Mustika Ratu Tbk.
51	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
52	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
53	CINT	Chitose Internasional Tbk
54	KICI	Kedaung Indah Can Tbk
55	LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk.
56	WOOD	Integra Indocabinet Tbk
57	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk

Sumber : www.idx.co.id (2021)

3.4.2 Sampel

Menurut Hardani, S.Pd., M.Si. (2020) sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan *sampling*. Sampel harus dapat mencerminkan keadaan populasi yang artinya hasil penelitian yang diambil dari sampel haruslah kesimpulan atas populasi. Adapun teknik *sampling* yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang artinya menurut Hardani, S.Pd., M.Si. (2020) adalah anggota *sampling* dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2021 dengan jumlah 57 perusahaan. Setelah diterapkan *purposive sampling* dengan

kriteria tertentu, maka perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 12 perusahaan dari periode tahun 2018 – 2021 sehingga jumlah sampel adalah 48 laporan keuangan tahunan atau 48 data. Dapat dilihat dari tabel 3.2

Tabel 3.2
Jumlah sampel berdasarkan kriteria

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2021	57
2	Perusahaan <i>consumer goods</i> yang mengalami kerugian selama tahun 2018 – 2021	(17)
3	Perusahaan <i>consumer goods</i> yang belum menerbitkan laporan keuangan di bursa efek Indonesia dan tidak memiliki data lengkap selama tahun 2018 – 2021	(28)
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	12
	Jumlah laporan keuangan yang diteliti (12 perusahaan x 4 tahun)	48

Sumber: Data Olahan (2021)

Tabel 3.3
Sampel perusahaan consumer goods

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
3	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
4	HMSP	HM Sampoerna Tbk.
5	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
6	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
7	KINO	Kino Indonesia Tbk
8	KLBF	Kalbe Farma Tbk.

9	PEHA	Phapros Tbk.
10	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
11	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
12	WOOD	Integra Indocabinet Tbk

Sumber: www.idx.co.id (2021)

3.5 Definisi Operasional Variabel

Agar konsep yang digunakan dapat diukur secara empiris serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran makna atau arti yang berbeda, untuk itu akan diberikan definisi dari variabel-variabel yang digunakan, baik variabel independen maupun variabel dependen yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2013), variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu:

X1 = Perencanaan Pajak

X2 = Piutang Tidak Tertagih

X3 = Perputaran Arus Kas

Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak adalah adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang merupakan suatu proses mengorganisasi utang pajak agar berada dalam jumlah minimal selama tidak

melanggar undang-undang. Perencanaan pajak ini dihitung dalam dengan rumus tingkat retensi pajak.

Menurut Anny Widiasmara (2014) Piutang tidak tertagih adalah piutang yang dianggap sebagai utang konsumen atas transaksi bisnis yang wajar, akan tetapi piutang tersebut tidak dapat ditagih walaupun sudah dilakukan upaya penagihan oleh perusahaan.

Menurut L. Rizkiyanti Putri (2013) Perputaran arus kas adalah periode berputarnya kas yang dimulai pada saat kas diinvestasikan hingga kembali menjadi kas. Rasio perputaran kas merupakan perbandingan antara penjualan dengan kas rata-rata. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas perusahaan dalam mengelola dana kasnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan.

3.5.2 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2013), variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu:

Y = Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan-tindakan manajer yang dimaksudkan untuk memperbesar atau memperkecil laba bersih yang dilaporkan sekarang tanpa menimbulkan kenaikan atau penurunan profitabilitas ekonomis perusahaan dalam

jangka panjang. Manajemen laba dihitung dengan menggunakan pendekatan distribusi laba.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah teknik pengolahan data yang peneliti lakukan adalah data-data sekunder yang peneliti peroleh, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang akan diteliti seperti berikut ini:

a. Wild Aditama and Purwaningsih (2014) menyatakan untuk mendapatkan angka perencanaan pajak dapat digunakan rumus:

$$\text{TRR}_{it} = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

b. Mitayani (2016) menyatakan untuk mendapatkan rasio tunggakan dapat menggunakan rumus:

$$\text{TRR}_{it} = \frac{\text{Total Piutang tak Tertagih}}{\text{Penjualan Kredit}} \times 100\%$$

c. Utami (2018) menyatakan untuk perputaran kas dapat menggunakan rumus:

$$\text{Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata - rata kas dan bank}}$$

d. Philips Aditama and Purwaningsih (2014) menyatakan untuk manajemen laba dapat dihitung dengan rumus:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{it-1}}$$

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data variabel yang disajikan melalui tabel, diagram, histogram, plogori, frekuensi, ukuran penepatan, perhitungan rata-rata, dan perhitungan persentase.

2. E-Views

E-Views merupakan aplikasi komputer berbasis Windows yang sering digunakan ketika analisis statistika dan ekonometri jenis runtun-waktu. Program Eviews merupakan salah satu software analisis data multiariat dan ekonometrika yang cukup terkenal karena kemampuannya dalam mengolah berbagai jenis data seperti *cross section*, *time series*, dan panel. Kelebihan dari Eviews ialah menyediakan fasilitas metode estimasi regresi yang lebih lengkap dibandingkan dengan software lain. Selain itu, kemudahan penggunaan (user friendly) menyebabkan Eviews banyak digunakan dalam penelitian sosial. Eviews dikembangkan oleh Quantative Micro Software (QMS) sebagai penerus program MicroTSP Wahyudi (2016).

3.7.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtun waktu biasanya meliputi suatu objek atau individu tetapi meliputi beberapa periode sedangkan data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek yang sering disebut sebagai responden (contohnya perusahaan) dengan beberapa jenis data dalam suatu periode waktu tertentu. Ada juga beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel yaitu data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar dan juga dapat menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*).

Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, maka modelnya dituliskan dengan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta'x' + x_{it} ; I = 1,2,\dots,N; t = 1,2,\dots,T$$

Keterangan

$i = 1,2,\dots,N$, menunjukkan dimensi data silang (*cross section*)

$t = 1,2,\dots,T$, menunjukkan dimensi deret waktu (*time series*)

α = koefisien intersep yang merupakan scalar

β = koefisien slope dengan dimensi $K \times 1$, dimana K adalah banyak variabel bebas

Y_{it} = variabel terikat unit individu ke- i dan unit waktu ke- t

X_{it} = variabel bebas untuk unit individu ke- i dan unit waktu ke- t

3.7.1.1 Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga macam model estimasi regresi data panel, yaitu:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Menurut Wahyudi (2016) teknik ini tidak ada bedanya dengan regresi menggunakan data *cross section* dan *time series*. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi data *cross section* dengan data *time series* harus digabungkan terlebih dahulu. Kemudian data gabungan ini diperlukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode *ordinary least square* (OLS). Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Namun, dengan menggabungkan data tersebut, maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu ataupun antar waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Bila diasumsikan bahwa α dan β akan sama untuk setiap data *time series* dan *cross section*, maka α dan β dapat diestimasi dengan model berikut menggunakan $N \times T$ pengamatan.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Menurut Wahyudi (2016) asumsi penting yang digunakan dalam model FEM bahwa nilai perbedaan antarindividu dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Estimasi yang digunakan adalah OLS. Terdapat beberapa teknik estimasi yaitu *least square dummy variable* (LSDV), *between estimator*, dan *within estimator*.

- a. *Least square dummy variable (LSDV)*. Dummy variabel yang dimaksud adalah unit *cross section* menjadi variabel dalam model. Model yang dibuat dalam mengestimasi LSDV adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \alpha_1 + \sum_{k=2}^N a_k D_{ki} + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

- b. *Between estimator*. Metode ini hanya menunjukkan bahwa dalam model terdapat keragaman yang berasal dari unit *cross section*. Caranya, dengan menggunakan rata-rata seluruh waktu pada setiap unit *cross section*, sehingga menghasilkan model tereduksi seperti berikut:

$$\bar{Y}_i = a_i + \beta \bar{X}_i + \bar{\varepsilon}_i$$

- c. *Within estimator*. dilakukan transformasi terhadap data untuk menghilangkan efek heterogenitas yang tidak terobservasi. Tahapannya ialah sebagai berikut:

- 1) Model awal:

$$Y_{it} = a_i \beta_1 X_{1i} + \bar{\varepsilon}_{it}$$

- 2) Pada model tersebut, dilakukan perhitungan rata-rata dari seluruh waktu pengamatan bagi setiap unit *cross section*:

$$\bar{Y}_i = \beta_1 \bar{X}_{1i} + \bar{\varepsilon}_i$$

- 3) Berdasarkan persamaan no.1 dan no.2, dilakukan transformasi:

$$Y_i - \bar{Y}_i = \beta (X_{1i} - \bar{X}_i) (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

4) Persamaan no.3 kemudian diestimasi dengan panel OLS

3. *Random Effect Model (REM)*

Menurut Wahyudi (2016) asumsi penting dalam model ini bahwa nilai perbedaan antarindividu tidak boleh berkorelasi dengan variabel bebas. Dengan kata lain, model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu

a. Pada model panel berikut, jika digunakan metode REM (persamaan a) maka *unobserved factor* dan *disturbance error* dimasukkan dalam komponen *error*, v_{it} (persamaan b) supaya antara *unobserved factor* dengan peubah eksogen tidak berkorelasi.

b. Komponen error (persamaan b) dapat dibuat karena *unobserved factor* dengan *disturbance error* memiliki distribusi yang sama (persamaan c)

c. Model yang dihasilkan (persamaan d) disebut model REM, dan metode estimasi yang dapat digunakan adalah *generalized least square (GLS)*.

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \epsilon_{it} \quad (a)$$

$$V_{it} = \alpha_i + \epsilon_{it} \quad (b)$$

$$\alpha_i \sim N(0, \sigma^2_{\alpha}), \epsilon_{it} \sim N(0, \sigma^2_{\epsilon}) \quad (c)$$

$$Y_{it} = \beta X_{it} + V_{it} \quad (d)$$

3.7.1.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan metode secara statistik dilakukan agar dugaan yang diperoleh dapat se-efisien mungkin. Maka, terdapat dua pengujian dalam menentukan model yang akan digunakan dalam pengolahan data panel, yaitu:

1. *Chow Test* (Uji Chow)

Chow Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan adalah common effect atau fixed effect. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : model *common effect*

H_1 : model *fixed effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan Chow statistik (F statistik) hitung yang akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak n-1 untuk *numerator*. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak sehingga teknik regresi data panel dengan *fixed effect* model lebih baik dari *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect*. Alasan dilakukannya uji hausman didasarkan pada model *fixed effect* yang mengandung suatu unsur *trade off* yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel *dummy* dan model *random effect* yang harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : model *random effect*

H_1 : model *fixed random*

Dasar penolakan H_0 dengan menggunakan statistik Hausman dan membandingkannya dengan chi-square. Jika hasil pengujian *hausman test* lebih besar dari tabel (nilai kritis statistik dari chi-square), maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect* dan begitu juga sebaliknya.

3. Lagrange Multiplier (LM) Test

Lagrange multiplier test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : model *common effect*

H_1 : model *random effect*

Uji LM ini didasarkan pada probabilitas *breusch-pagan*, jika nilai probabilitas *breusch-pagan* lebih kecil dari nilai alpha maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan begitu juga sebaliknya.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau resi mempunyai distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan

nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika terjadi pelanggaran asumsi ini, maka uji statistic menjadi tidak valid jumlah sampel kecil.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel independen. Jika antarvariabel independen (X) terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien regresi variabel X tidak dapat ditentukan dan nilai *standar error* menjadi tak terhingga. Jika multikolinearitas antarvariabel (X) tidak sempurna tetapi tinggi, maka koefisien regresi X dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai *standard error* tinggi yang berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau korelasi tinggi antarvariabel, yaitu sebagai berikut:

- a) Nilai R^2 tinggi, tetapi hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel independen yang signifikan. Jika nilai R^2 tinggi di atas 0.80, maka uji F pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien slope parsial secara simultan sama dengan nol, tetapi uji t individual menunjukkan sangat sedikit koefisien slope parsial yang secara statistis berbeda dengan nol.
- b) Korelasi antar dua variabel independen yang melebihi 0.80 dapat menjadi pertanda bahwa multikolinearitas merupakan masalah serius

- c) *Auxiliary regression*, dimana multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel independen berkorelasi secara linear dengan variabel independen lainnya. Salah satu cara menentukan variabel X mana yang berhubungan dengan variabel X lainnya ialah dengan meregresi setiap X_i terhadap variabel X sisanya dan menghitung R^2 . Hubungan antara F dan R^2 dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut:

$$F_i = \frac{R^2_{x_1.x_2.x_3\dots x_k} / (k-2)}{(1-R^2_{x_1.x_2.x_3\dots x_k}) / (n-k+1)}$$

Variabel mengikuti distribusi F dengan derajat bebas (df) $k-2$ dan $n - k + 1$, n adalah ukuran sampel, k jumlah variabel independen termasuk intersep dan $R^2_{x_1.x_2.x_3\dots x_k}$ adalah koefisien determinasi dalam regresi X_i terhadap variabel X lainnya. Jika nilai F hitung > nilai F table, maka X_i berkorelasi tinggi dengan variabel X lainnya. Multikolinearitas menjadi bermasalah jika R^2 yang diperoleh dari *auxiliary regression* lebih tinggi daripada R^2 keseluruhan yang diperoleh dari meregresi semua variabel X terhadap Y.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastitas

Menurut Wahyudi (2016) heteroskedastisitas adalah kondisi yang berkaitan dengan nilai residual dalam model yang memiliki sifat tidak minimum dan berubah sepanjang waktu/observasi. Ada beberapa penyebab varian residual tidak konstan tetapi bervariasi antara lain:

- a. Heteroskedastisitas dapat terjadi karena adanya data outlier (data ekstrim).

- b. Heteroskedastisitas dapat juga timbul karena adanya pelanggaran terhadap model regresi yang telah dispesifikasi secara benar. Hal ini berarti ada kesalahan spesifikasi model seperti ada variabel independen penting yang belum dimasukkan ke dalam model.
- c. *Error-learning model*, ialah model pembelajaran kesalahan menyatakan bahwa seseorang akan belajar dari pengalaman, sehingga perilaku yang salah akan semakin kecil sepanjang waktu dan dalam hal ini nilai variance σ^2 diharapkan semakin menurun.
- d. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi *discretionary income* mereka yang pada gilirannya semakin besar pilihan penggunaan *income* mereka. Jadi *variance* (σ^2) meningkat dengan *income*. Oleh karena itu, jika kita meregresikan tabungan terhadap *income* akan diperoleh nilai *variance* (σ^2) yang meningkat sejalan dengan *income*. Hal yang sama terjadi pada perusahaan yang memiliki laba besar cenderung memiliki variabilitas yang tinggi di dalam kebijakan dividen mereka dibandingkan perusahaan dengan laba yang rendah.
- e. Adanya perbaikan dalam teknik pengumpulan data. Hal ini menyebabkan *variance* (σ^2) akan semakin menurun. Bank yang memiliki peralatan pengolahan data yang canggih cenderung mengalami kesalahan yang kecil dalam penyajian laporan bulanan kepada nasabahnya dibandingkan pada bank yang peralatan pengolahan datanya yang kurang canggih.

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji t(Uji Parsial)

Uji t (Uji Parsial) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.3.2 Uji F(Uji Simultan)

Uji F (Uji Simultan) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut:

- Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak, karena secara bersama-sama variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis diterima, karena secara bersama-sama variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.4 Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen atau umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Model regresi estimasi yang dipakai untuk membentuk persamaan regresi di atas adalah metode *ordinary least square* (OLS). Seperti diketahui tujuan dari analisis regresi adalah tidak hanya mengestimasi nilai β_1 dan β_2 , tetapi juga ingin menarik kesimpulan nilai yang benar dari β_1 dan β_2 . Misalkan, kita ingin mengetahui seberapa dekat nilai β_1 dan β_2 berdasarkan sampel terhadap nilai sesungguhnya β_1 dan β_2 berdasarkan populasinya. Dengan demikian, kita tidak hanya menspesifikasi bentuk model fungsional, tetapi kita juga harus membuat asumsi bagaimana nilai Y diperoleh. Seperti terlihat pada persamaan di atas, nilai Y tergantung dari kedua nilai X dan μ . Jadi untuk menaksir nilai Y, kita harus tahu bagaimana nilai X dan μ diperoleh. Oleh karena itu mengetahui asumsi tentang nilai X dan nilai kesalahan μ merupakan hal yang penting untuk interpretasi dan estimasi terhadap regresi.

3.7.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen ketika menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.8 Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Sep 2021				Okt 2021				Nov 2021				Des 2021				Jan 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Laporan																				
3	Seminar Proposal																				
4	Pembuatan Skripsi																				

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ferry, And Anna Purwaningsih. 2014. "The Effect Of Tax Planning On Earnings Management In Non-Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock." *MODE-Journal Of Economics And Business* 26(1):33–50.
- Fahmi, I. 2014. *Manajemen Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung.
- Ftouhi, Khaoula, And Wafa Ghardallou. 2020. "International Tax Planning Techniques: A Review Of The Literature." *Journal Of Applied Accounting Research* 21(2):329–43. Doi: 10.1108/JAAR-05-2019-0080.
- Ghozali, Imam. 2014. "Teori Akuntansi." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9).
- Ghozali, Imam. 2020. *25 GRAND THEORY*. Semarang: YOGA PRATAMA.
- Hardani, S.Pd., M.Si., Dkk. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak (Pertama)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, N. 2013. *Pemeriksaan Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Lee, Hyun-Ah, And Won-Wook Choi. 2016. "Allowance For Uncollectible Accounts As A Tool For Earnings Management." *International Journal Of Accounting & Information Management* 24(2):162–84. Doi: 10.1108/IJAIM-06-2015-0040.
- Mitayani, Dhenok. 2016. "ANALISIS PIUTANG TAK TERTAGIH TERHADAP

Tingkat Perputaran Piutang Pada Cv. Berlian Abadi Di Surabaya.”

Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*.

Ningsih, Febriana, And Yulius Jogi. 2018. “Bad Debt Expense.” *Febriana Ningsih Hoki Dan Yulius Jogi Christiawan* 109–20.

Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyono, D. .. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.

Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rachman, Taufiqur. 2015. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Free Cash Flow, Roa, Dan Perputaran Aset Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Tambang Batu Bara.” *Jurnal Akuntansi Unesa* 2(1):1–22.

Scott, W. .. 2015. *Financial Accounting Theory*. Canada.

Smith, Adam. N.D. “An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations.”

Suandy, E. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. 6th Ed. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung.

Sulistiyanto, H. .. 2014. *Manajemen Laba Teori & Model Empiris*. Jakarta:

Grasindo.

Utami, Mardian Tri. 2018. "Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas."

Veronica Sihombing. 2016. "Piutang."

Wahyudi, Setyo Tri. 2016. *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika*. Pt Rajagrafindo Persada.

Curriculum Vitae



A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Gibson Radityo Lim
Gender : Male
Place and Date of Birth : Tanjungpinang, 31 May 2000
Citizen : Indonesia
Age : 22 years old
Present Address : Jl. Delima GG Delima IV No. 2 Blok B
Religion : Buddha
Email : gibsonlim55@gmail.com
Phone Number/WA : 082387338948

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

TYPE OF SCHOOL	NAME OF SCHOOL & LOCATION	NO. OF YEAR COMPLETED
Senior High School	SMK Pembangunan, Tg. Pinang	2018 year
University	STIE Pembangunan, Tg. pinang	2022 year